

PEDULI STUNTING DI SUKOHARJO Polres Libatkan Bhabinkamtibmas



KR-Dok Polres Sukoharjo

Bhabinkamtibmas Polres Sukoharjo memberikan pendampingan dalam kegiatan Posyandu.

SUKOHARJO (KR) - Polres Sukoharjo melibatkan Bhabinkamtibmas untuk memberikan pendampingan pada kegiatan Posyandu yang digelar di wilayah bi-naannya masing-masing, Jumat (10/2).

Pendampingan pada kegiatan Posyandu tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan stunting.

Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyan mengatakan sosialisasi dan edukasi digelar sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia, bahwa Polri ditugaskan untuk membantu pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan stunting. Pada pendampingan tersebut, para Bhabinkamtibmas memberi imbauan kepada masyarakat untuk hidup sehat agar terhindar dari stunting.

Selain itu, para Bhabinkamtibmas juga memberi pesan agar kegiatan Posyandu rutin dilaksanakan, mengingat Posyandu sangat penting dalam upaya mengantisipasi terjadinya stunting.

"Mudah-mudahan dengan berbagai upaya yang dilakukan ini angka stunting, khususnya di Kabupaten Sukoharjo, dapat menurun," ungkap Kapolres.

Dalam kegiatan itu, khusus di wilayah Polokarto, Forkopimcam dan Kapolsek terjun langsung memberikan sosialisasi dan edukasi serta membagikan 100 paket bahan lauk pauk dan sayur-sayuran kepada para peserta Posyandu.

Disampaikan kepada masyarakat, stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari tinggi badan seumuran mereka. (Mam)-f

PROGRAM ELEKTRONIFIKASI DAERAH

Sukoharjo Launching 'Billing Center'

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo me-launching Aplikasi Billing Center. Penerapan tersebut dilakukan untuk mendukung program elektronifikasi daerah dalam melakukan proses pelayanan masyarakat dari sebelumnya tunai menjadi nontunai.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Jumat (10/2) mengatakan, Aplikasi Billing Center merupakan aplikasi yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung program elektronifikasi daerah dalam melakukan proses pelayanan masyarakat. Diharapkan, aplikasi tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penerimaan daerah. "Aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan beberapa pendapatan daerah ya-

tu retribusi, deviden dan Pendapatan Asli Daerah lainnya," jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil asesmen Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah masuk dalam kategori Digitalisasi dengan nilai 87,3 persen. Bupati berharap nilai tersebut bisa meningkat dan terus berinovasi agar semua transaksi Pemerintah Daerah berbasis elektronifikasi dapat berjalan sesuai perkembangan di era digitalisasi ini.

Hal tersebut, lanjut Etik Suryani, sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satu-tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Karena itu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus berusaha meningkatkan proses transaksi pemerintah daerah berbasis elektronifikasi serta perlu adanya instrumen yang dapat memonitor implementasi rekomendasi strategis elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

"Saya berharap dengan adanya Aplikasi Billing Center ini dapat menjadi salah satu wujud upaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah

yang lebih efektif dan efisien," tandas bupati.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko juga mengungkapkan, Aplikasi Billing Center merupakan aplikasi yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung

program elektronifikasi daerah dalam melakukan proses pelayanan masyarakat. Diharapkan aplikasi tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penerimaan daerah dengan mengkonversi transaksi tunai ke dalam bentuk nontunai berbasis elektronifikasi.

(Mam)-f



KR-Wahyu Imam Ibad

Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat launching Aplikasi Billing Center.

FESTIVAL DURIAN LOKAL KARANGANYAR

Promosi Wisata Lereng Gunung Lawu

KARANGANYAR (KR) - Promosi wisata lereng Gunung Lawu melalui festival durian lokal sukses menarik pemburu kuliner serta menggairahkan UMKM, durian lokal

dari sentra penghasil durian di wilayah Kecamatan Kerjo dan Ngargoyoso yang ditawarkan di area Bendungan Gondang Kerjo diserbu penikmat durian dari berbagai daerah.



KR-Abdul Alim

Bupati Karanganyar Juliyatmono dan Wabup Robber Christanto mempromosikan durian Gempolan.

Sehari menjelang penutupan festival, ribuan butir durian terjual dengan angka transaksi mencapai Rp 1 miliar lebih. Total terdapat 30 lapak penjual durian di area waduk dan 80 lapak di luarnya yang mengikuti festival durian lokal pada 7-9 Februari 2023. Panitia bazar menjamin harga durian terjangkau. Bahkan panitia melarang pemilik lapak di area festival menjual durian lebih dari Rp 60.000 perbuah. Rata-rata pedagang memasang paket empat Rp 100.000.

Bupati Karanganyar Juliyatmono menggodang-godang daerah Gempolan

dan sekitarnya menjadi pintu masuk wisata di Bumi Intanpari. Para pemburu durian lokal harga murah bakal terpicat berlama-lama di Gempolan untuk menikmati si raja buah. Baru kemudian berwisata di Ngargoyoso dan sekitar lereng Lawu.

"Durian Gempolan memang mantap. Ini pintu masuk terbaru untuk berwisata. Menikmati waduk sambil kuliner. Kami koordinasi dan membuat MoU antara pemerintah, BBSWS dan kelompok peduli Waduk Gondang, guna menyiapkan infrastrukturnya menyambut Lebaran nanti," tandas

Juliyatmono.

Kepala Desa Gempolan sekaligus ketua panitia festival durian lokal, Suhardi mengaku sengaja membuka bazar bulan ini, padahal panen durian sudah lewat. Ia mempertimbangkan perbaikan akses jalan. "Januari kemarin panennya. Tapi akses jalan ke lokasi waduk masih rusak. Sekarang lebih lumayan ada pemeliharaan, sehingga baru sekarang festival dibuka," jelasnya, Rabu (8/2).

Lapak durian dibuka di area bendungan milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBSWS). (Lim)-f

HUKUM



KR-Haryadi

OPERASI Keselamatan Progo 2023 yang digelar Polresta Yogyakarta, Jumat (10/2), memasuki hari keempat, mulai menerapkan sistem sidang di tempat bagi para pelanggar lalu lintas. Menurut Kasat Lantas Polresta Yogyakarta Polda DIY AKP Maryanto SH MM, pada operasi di Jalan Pasar Kembang pihaknya menerapkan sanksi, salah satu dasarnya banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengendara dengan dasar tilang ETLE.

BUPATI GUNUNGKIDUL ANCAM BERI SANKSI BERAT

Oknum Guru Pelecehkan Siswinya

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul, H Sunaryanta, memerintahkan Dinas Pendidikan setempat melakukan penanganan serius terhadap DA seorang oknum Guru SD di Kapanewon Wonosari yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya.

"Jika ditemukan adanya bukti agar diberikan sanksi berat sampai dengan pemecatan. Proses penanganan masih berlangsung dan dimulai dari tingkat bawah dulu. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran," tegas Sunaryanta, Jumat (10/2).

Tindakan yang dilakukan oknum guru yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswi adalah amoral dan termasuk pelanggaran. Karena itu, kata bupati, sanksi yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun peraturan turunnya. "Nanti kalau ada indikasi pelanggaran berat, bisa diberi sanksi peme-

catan," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, terungkapnya kasus pelecehan ini bermula laporan dari walimurid pada Kamis, 26 Januari 2023. Salah satu orangtua siswi di sebuah SD Negeri di Wonosari melaporkan oknum guru DA, ke sekolah karena tidak terima anak gadisnya yang duduk di kelas 6 mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari oknum gurunya.

Selang satu hari setelah dilaporkan, pihak sekolah melakukan penanganan. Oknum guru tersebut juga mengaku jika telah memegang dada dan pinggang salah seorang siswi. Akhirnya setelah melalui mediasi, disepakati untuk penyelesaian damai atau kekeluargaan.

Oknum guru tersebut membuat

surat pernyataan penyesalan, permintaan maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari pihak sekolah, oknum guru tersebut kemudian diberikan sanksi untuk pindah mengajar ke kelas lain (masih lingkup satu sekolah) dan dilakukan pembinaan. Kebijakan inilah yang diduga menjadikan banyak pihak tidak sependapat, karena sanksi itu tidak berdampak terhadap efek jera. "Semestinya, sanksi pindah tidak sekedar dipindah mengajar ke kelas lain yang berpotensi menimbulkan trauma siswa tapi di tempat lain," ucap salah satu orangtua siswa.

Sementara itu, petugas Polsek Purwosari Gunungkidul menangkap Zer (19) warga Kapanewon Pundong Bantul, karena dilaporkan melakukan pemaksaan persetubuhan terhadap korban, Bunga (15) yang masih di bawah umur, warga Bantul.

Terlapor berhasil memperdaya korban dengan membawanya ke sebuah tempat penginapan di Purwosari Gunungkidul. (Bmp)-f

MINYAK GORENG MURAH LANGKA DI PASARAN

Polda Jateng Gerebek Penimbunan Minyakita

KENDAL (KR) - Minyak goreng bersubsidi 'minyakita' langka di pasaran. Kondisi ini mendorong Tim Satgas Pangan Polda Jateng giat melancarkan penyelidikan.

Dari kerja keras tidak kenal waktu telah membuahkan hasil dengan membongkar aksi penimbunan minyakita di toko sembako di pasar Weleri Kabupaten Kendal.

Jumlah minyakita yang ditimbun Toko TJ begitu banyak. Yakni, mencapai 19.548 liter atau 17,5 ton. Di kabarkan toko itu menjual kepada masyarakat di atas harga eceran tertinggi (HET).

Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, kepada wartawan, Kamis (9/2).

"Terungkapnya penimbunan minyak bersubsidi itu berawal Satgas Pangan Polda Jawa Tengah mendapatkan keluhan dari masyarakat tentang sulitnya mencari minyak goreng kemasan rakyat atau domestic market obligation (DMO) merek

Minyakita di pasaran," jelasnya.

Dengan adanya informasi itu, menurut Kabid Humas, Satgas Pangan Polda Jateng yang dipimpin Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio, juga juga Ketua Satgas Pangan Polda Jateng melakukan penyelidikan.

Upaya ini telah membuahkan hasil pada Kamis (2/2) siang, tim menemukan Toko TJ di Pasar Weleri Kabupaten Kendal menimbun Minyakita dalam jumlah besar dan menjualnya di atas HET Rp 15.400 per liter.

Kemudian tindakan lebih lanjut Satgas Pangan Polda Jawa Tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah termasuk dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan di Toko TJ berada di Pasar Weleri Kendal ditemukan tumpukan kemasan Minyakita cukup banyak. Yakni, 19.548 liter atau 17,5 ton yang belum tersalurkan kepada masyarakat.

Ia menegaskan sesuai Permendag No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, HET Minyakita dijual Rp 14.000 perliter atau Rp 15.500 perkg.

"Jadi sesuai peraturan itu pengecer wajib menjualnya dengan harga di bawah atau sama dengan HET. Dan, berdasarkan ketentuan itu pula, di pasal 23 ayat (1) jika ada pengecer tidak melaksanakan kewajiban itu dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis," tuturnya.

Sementara itu dari hasil pemeriksaan terhadap Toko TJ bahwa toko itu mendatangkan membeli Minyakita pada 23 Januari 2023 dari 2 sumber PT. DKI Kendal Jalan Tentara Pelajar No 888 Kendal dan PT GBI alamat Jalan Guntur Geung Rumiza lantai dasar nomor 22 Setiabudi, Jakarta Selatan. Dari PT DKI Kendal membeli 1.360 dus, sedangkan dari PT GBI membeli sebanyak 2.000 dus.

Berdasarkan nota penjualan yang ditemukan telah terjual sebanyak

1.146 dus, ini data stok berdasarkan nota sebanyak 2.214 dus. Adapun data stok barang per tanggal 2 Februari 2023 barang yang masih tersedia di gudang sebanyak 1.573 dus.

Selisih ini diduga ada nota penjualan



KR-Istimewa

Dirreskrimsus Kombes Pol Dwi Subagio dan Kabid Humas Kombes Pol M Iqbal menunjukkan barang bukti hasil penimbunan minyak goreng.